



PAPARAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
BIRO PERSIDANGAN II
SETJEN DPR RI
MENUJU WBK/WBBM



DASAR HUKUM



Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021



Surat Tugas Biro Persidangan II Nomor 78/PD/II/SETJEN DPR RI/5/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021



STRUKTUR ORGANISASI

Dr. Indra Iskandar
SEKRETARIS
JENDERAL

Dra. Damayanti, M.Si.
DEPUTI
BIDANG
PERSIDANGAN

Dra. Nurul Faiziah
PIL. KEPALA
BIRO
PERSIDANGAN
II

Widiharto, S.H., M.H.
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
BADAN
LEGISLASI

Dra. Nurul Faiziah
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
BADAN
ANGGARAN

Mardi Harjo, S.E., M.Si.
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
BADAN
AKUNTABILIT,
KEUANGAN

Chrysanthi Permatasari, S.H.
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
MAHKAMAH
KEHORMATAN
DEWAN

Wazir, S.E., M.M.
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
BADAN
URUSAN
RUMAH

Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.
KEPALA
BAGIAN
SEKRETARIAT
PANITIA
KHUSUS



VISI DAN MISI BIRO PERSIDANGAN II

VISI : Terwujudnya Dukungan Persidangan Badan yang Professional dan Akuntabel





TIMELINE ZI ROSID II

15 Januari 2021

Biro Persidangan II
ditetapkan sebagai Unit
Kerja Pembangunan ZI

30 Juli 2021

Submit LKE ZI Biro Persidangan
II ke Kemenpan RI oleh
Inspektorat Utama DPR RI



November 2021

Persiapan Evaluasi ZI-RB dan
Verifikasi Lapangan 2021

10-21 Oktober 2021

Pelaksanaan Survei ZI oleh
Kemenpan RB terhadap
pengguna layanan Biro
Persidangan II



AREA I : MANAJEMEN PERUBAHAN

Tim Kerja

Tim Kerja Zona Integritas Biro Persidangan II telah dibentuk dengan Surat Keputusan Sekjen Nomor 208/Sekjen/2021, sebagai dasar hukum bagi Biro Persidangan II yang telah ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dokumen Rencana Pembangunan ZI

Penyusunan Rencana Kerja dan SOP Zona Integritas selama tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai secara langsung maupun melalui website

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan ZI

Pemantauan dan Evaluasi WBK/WBBM telah dilakukan juga melalui rapat-rapat dan kegiatan dalam lingkup Biro Persidangan II secara berkala

Biro Persidangan II, dalam mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menunjuk Saudara Renaldi Setiawan, S.IP sebagai Agen Perubahan sebagai Kasubag Tata Usaha pada Bagian Sekretariat Badan Anggaran melalui Surat Tugas Nomor 105/PD.II/SETJEN DPR RI/06/2021 . Sasaran Agenda Perubahan adalah Digitalisasi bahan/materi kegiatan rapat, percepatan informasi kepada Anggota dan peningkatan kemampuan SDM dalam Teknologi Informasi. Langkah perubahan perubahan yang telah dilakukan:
 - Pemanfaatan penggunaan Cloud DPR sebagai media digital sebagai Data Base, dalam rangka mendukung program "paperless"
 - Penggunaan aplikasi PIM Banggar (PIM DPR) sebagai langkah perubahan/inovasi pelayanan informasi kegiatan/rapat-rapat Dewan kepada Anggota Badan Anggaran secara digital, cepat dan lengkap.
- a. Langkah perubahan pola pikir dan budaya kerja juga diikuti pada Bagian Sekretariat BAKN, yang telah menggunakan Cloud SICAVID untuk menyampaikan bahan-bahan rapat kepada seluruh anggota BAKN.
- b. Rapat-rapat Koordinasi pada setiap bagian di lingkungan Biro Persidangan II, yang selalu menyampaikan arahan dan contoh bagi pimpinan unit kerja terhadap pegawai untuk selalu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik, sesuai dengan MOTTO Biro Persidangan II **SUKSES** adalah **CINTA**, yaitu Commitmen, Integritas, Niat, Takwa dan Action.



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN



Biro Persidangan II telah ditunjuk untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas melalui penetapan SK ZI dan SK tim.

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 78/PPD II /SETJEN DPR RI/5/2021

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021;
- b. Untuk kelancaran kerja, efektifitas, pelaksanaan, dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021;

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : 208 /SEKJEN/2021
TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat :

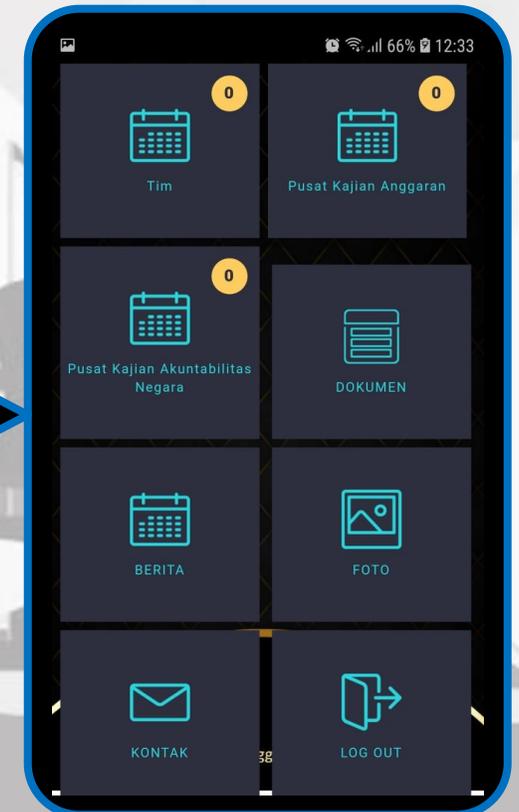
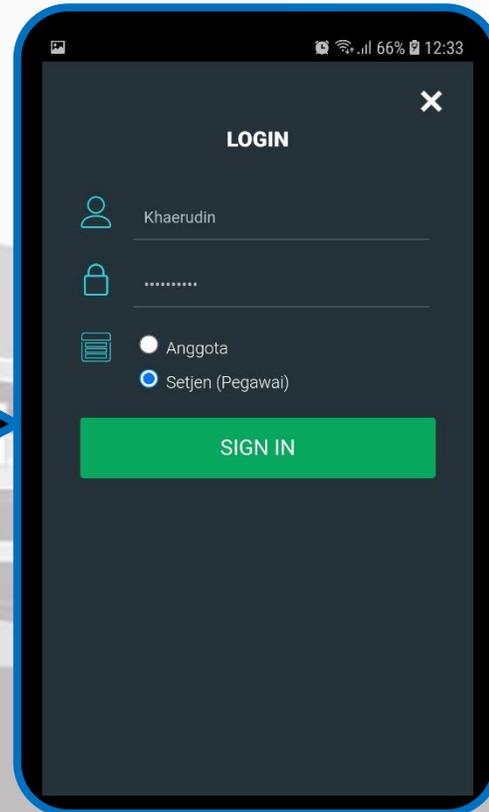
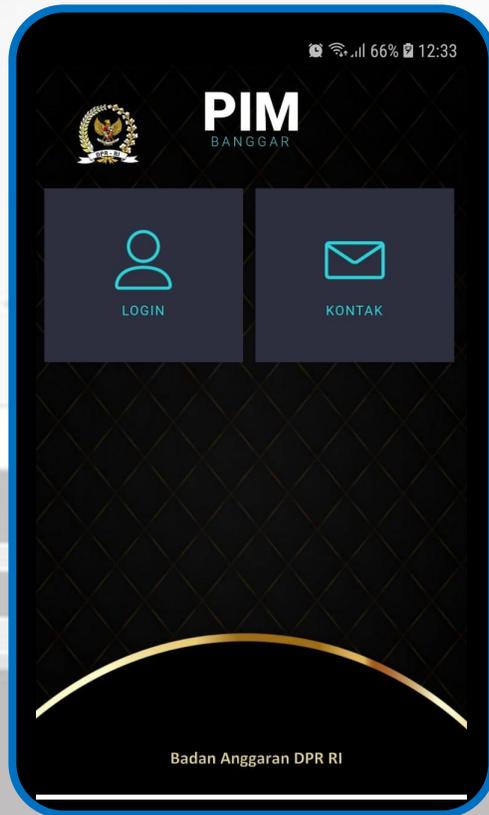
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



INOVASI DI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN



Aplikasi PIM DPR RI berupa inovasi teknologi informasi yang berisikan informasi data kegiatan Anggota DPR RI berikut bahan/materi secara digital kepada Anggota DPR RI guna mendukung tugas pokok dan fungsinya



Aplikasi *Personal Information for Members of the DPR RI* (PIM DPR RI)



AREA II : PENATAAN TATALAKSANA

SOP

- Penyusunan SOP telah mengacu pada peta proses bisnis instansi
- Pelaksanaan pelayanan rapat dan tata usaha telah berlandaskan SOP yang berlaku
- Melakukan pembaharuan SOP sesuai dengan hasil evaluasi SOP tahun-tahun sebelumnya

E-Office

- Proses pengukuran kinerja di Biro Persidangan II pada semua jenjang level jabatan telah menggunakan aplikasi PPKP
- Operasionalisasi manajemen SDM telah terdigitalisasi dan terpadu melalui portal.dpr.go.id
- Biro Persidangan II telah melakukan transformasi menuju digitalisasi pelayanan rapat dan tata usaha
- Aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan rapat dan tata usaha di Biro Persidangan II telah di monitoring dan dievaluasi pemanfaatannya

Keterbukaan Informasi Publik

- Biro Persidangan II telah menunjuk pejabat pengelola informasi PPID, dan telah menyebarkan seluruh informasi publik melalui website dpr.go.id
- Pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya melalui pembaruan DIP dan DIK sesuai hasil evaluasi



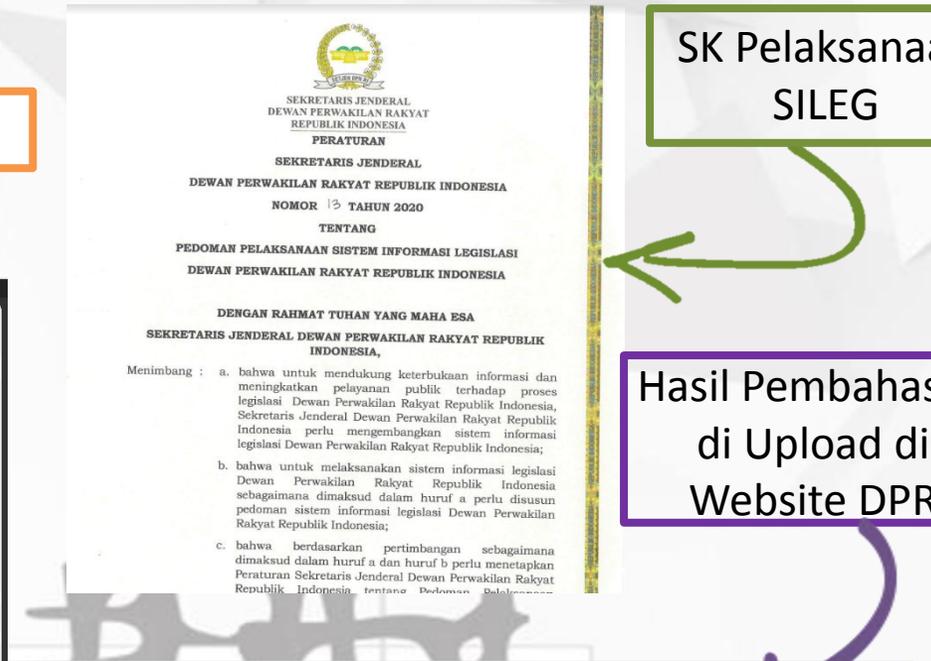
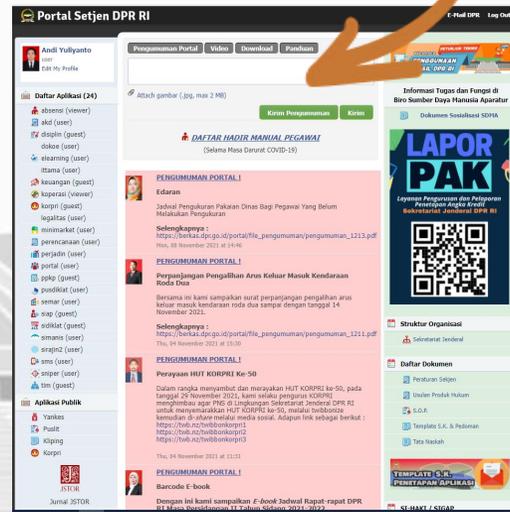
PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PENATAAN TATA LAKSANA

Pelaksanaan rapat koordinasi ZI Area 2

E-office

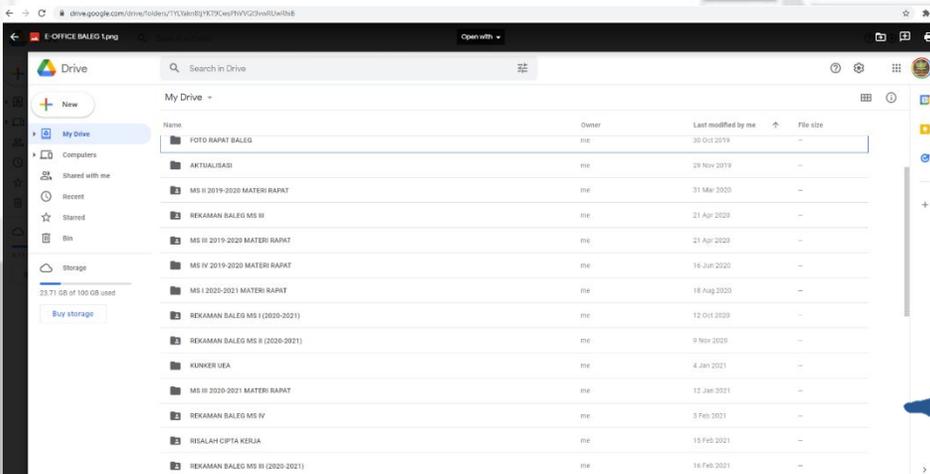
SK Pelaksanaan SILEG

Hasil Pembahasan di Upload di Website DPR



Laporan Singkat

#	TANGGAL	JUDUL	UKURAN
1	23-09-2021	1. Laporan Paripol atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	49,91 KB
2	23-09-2021	1. Laporan Paripol atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	29,82 KB
3	23-09-2021	1. Laporan Paripol atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	29,82 KB
4	23-09-2021	1. Laporan Paripol atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	29,82 KB
5	23-09-2021	1. Laporan Paripol atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi selatan, utara, tengah dan tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	29,82 KB



E-Office di Baleg



AREA III : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

- Kebutuhan pegawai di Biro Persidangan II telah sesuai dengan peta jabatan dan ABK
- Perekrutan dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan di unit-unit kerja
- Pelaksanaan monev terhadap penempatan pegawai

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Pelaksanaan *training need analysis*
- Penyusunan pengembangan kompetensi mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai <25%
- Seluruh pegawai memperoleh hak untuk mengikuti diklat/pengembangan kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku
- Pelaksanaan/pengikutsertaan pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Perilaku Pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Pola Mutasi Internal

- Pelaksanaan mutasi antarjabatan di lingkungan Biro Persidangan II
- Mutasi yang dilaksanakan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang sudah ditetapkan

Penetapan Kinerja Individu

- Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
- Pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya
- Pengukuran kinerja dilakukan setiap tahun melalui aplikasi PPKP
- Memberikan penghargaan terhadap hasil penilaian kinerja individu

Sistem Informasi Kepegawaian

Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi SIAP dan dapat dilihat oleh seluruh pegawai melalui intranet portal.dpr.go.id



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM



Memberikan penghargaan terhadap hasil penilaian kinerja individu dengan melakukan mutasi untuk peningkatan kelas jabatan dan telah memperhatikan kompetensi jabatan, serta mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan



SK mutasi pegawai



SK promosi pegawai

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1368/SEKJEN/2021

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.l.;
Mengingat : d.s.l.;
Memperhatikan : d.s.l.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 ke dalam Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Hak Kesenangan dan Administrasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN d.s.t.

Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL
INDRA ISKANDAR

Penyaji dengan aslinya
SEKRETARIS BINA SUMBER DAYA MANUSIA
RAHMAD BUDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1368/SEKJEN/2021 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	DOL	NIP	JABATAN/KELAS JABATAN			KEPUTUSAN/PERENCANAAN		KET
				JABATAN LAMA	KELAS JABATAN	JABATAN BARU	KELAS JABATAN	MONDOK	
1	d.s.l.								
22	Kipno	024	1976020010010001	Pengelola Data dan Sistem Informasi	6	Analisa Data dan Sistem Informasi	7	08/10/2021	1-9-2021
23	d.s.l.								
24	d.s.l.								
25	d.s.l.								
26	d.s.l.								

KEPALA BINA SUMBER DAYA MANUSIA: RAHMAD BUDIANTO
SEKRETARIS JENDERAL: INDRA ISKANDAR

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : d.s.l.;
Mengingat : d.s.l.;
Memperhatikan : d.s.l.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Promosi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 ke dalam Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Hak Kesenangan dan Administrasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN d.s.t.

Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL
INDRA ISKANDAR

Penyaji dengan aslinya
SEKRETARIS BINA SUMBER DAYA MANUSIA
RAHMAD BUDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1368/SEKJEN/2021 TANGGAL : 6 JANUARI 2021

NO	NAMA	DOL	NIP	JABATAN/KELAS JABATAN			KEPUTUSAN/PERENCANAAN		KET	
				JABATAN LAMA	KELAS JABATAN	JABATAN BARU	KELAS JABATAN	MONDOK		TANGGAL
1	d.s.l.									
11	Widagdo Darmawan, S.P.A.	006	197700141090031000	Analisa Tata Usaha dan Sistem Informasi	7	Pegawai Sub Bagian Tata Usaha dengan Jabatan Fungsional BURT	9	540.000.	01/11/2021	6 Januari 2021
12	d.s.l.									
13	d.s.l.									
14	d.s.l.									
15	d.s.l.									
16	d.s.l.									

SEKRETARIS JENDERAL: INDRA ISKANDAR



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM



Pelaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai di lingkungan Biro Persidangan II untuk kegiatan pelatihan dan Pendidikan

15/7'24

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : PL/329/SETJEN DPR RI/PL.02/07/2021 14 Juli 2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembentukan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Persidangan

Yth. (daftar terlampir)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam pengelolaan dan manajemen persidangan secara efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, bersama ini kami beritahukan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan akan menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Persidangan pada:

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 26 s.d. 30 Juli 2021
Waktu : Pukul 08.00 s.d. 15.15 WIB.

Kami informasikan bahwa dalam upaya kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dalam pelatihan, maka pelatihan ini akan dilaksanakan secara virtual dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari unit kerja/ruah masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta bantuan Saudara untuk dapat menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk mengikuti pelatihan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Pelaksana (staf) Pengelola Persidangan/Pengadministrasi Ruang;
2. Memiliki komputer/laptop yang telah terinstal aplikasi Zoom Cloud Meeting;
3. Belum pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Persidangan;
4. Mengisi formulir kesediaan yang telah ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui atasan langsung. Formulir yang telah diisi dan mendapat persetujuan atasan dapat disampaikan ke Bidang Pelatihan Teknis atau melalui email bidang pelatहतeknis2@gmail.com paling lambat hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Pukul 15.00 WIB.

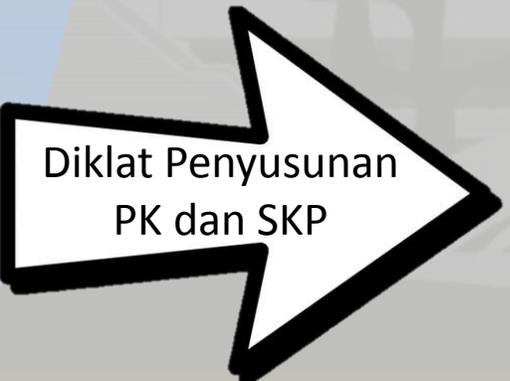
Untuk kemudahan dan kelancaran komunikasi pelaksanaan pelatihan kami telah menugaskan penanggung jawab kegiatan: Saudara Rhesa (0816413269) atau dapat melalui email pucdiklat@dpri.go.id. Apabila dalam pelaksanaan pelatihan ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Saudara dapat melaporkan melalui tautan bit.ly/laporPucdiklatDPR.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kapus Pendidikan dan Pelatihan,

Dr. Dewi Reriana S., M.Ps., QIA
NIP. 196209291988032001

Terbacaan:
1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Inspektur Utama Setjen DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI;
4. Ptt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI;
5. Para Kabid di lingkungan Pusdiklat Setjen DPR RI.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : PL/357/SETJEN DAN BK DPR RI/PL.02/07/2020 15 Juli 2020
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penugasan mengikuti Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai

Yth. Daftar Nama Peserta Terlampir
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa terhitung mulai tahun 2020 penyusunan Sasaran Kinerja PNS (SKP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penyusunan SKP tersebut diantaranya harus memperhatikan Perjanjian Kinerja, uraian jabatan dan SKP dari atasan langsung.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka sinkronisasi penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai, maka kami mengugaskan Saudara untuk mengikuti Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sesuai Jadwal Terlampir
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Ruang Belajar Pusdiklat Gedung Nusantara I DPR RI Lantai 3

dengan ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Apabila berhalangan hadir, penggantian peserta disesuaikan dengan jabatan dan masih dalam sub bagian yang sama;
3. Wajib membawa laptop;
4. Diharapkan mengikuti pembukaan Bimtek pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 Pukul 14.00 melalui Aplikasi Zoom Cloud Meetings dengan Meeting ID: 972 8324 6291 dan Password: 706849

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan kepesertaan bimtek, dapat menghubungi Bidang Pelaksanaan Diklat melalui nomor telepon: 021-5715736 atau narahubung: Saudara Endah Setianingsih (08181484601).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ptt. Kapus Pendidikan dan Pelatihan,

Rahmad Budiaji
NIP. 197008011996031001

Terbacaan:
1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Inspektur Utama Setjen DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI;
4. Ptt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI;
5. Karo Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI;
6. Para Kabid di lingkungan Setjen DPR RI.



AREA IV : Penguatan Akuntabilitas

Keterlibatan Pimpinan

- a. pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan (pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan)
- b. pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK 2021)
- c. pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- a. Biro Persidangan telah melakukan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan peraturan.
- b. seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil)
- c. unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (IKU)
- d. seluruh indikator kinerja unit kerja telah disusun secara SMART (seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART)
- e. Biro Persidangan II telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja 2020 di bulan Januari 2021, PK tahun 2020 telah disusun 1 bulan setelah DIPA ditetapkan, serta pelaporan Realisasi Anggaran dan Capaian Output setiap bulan.
- f. Biro Persidangan II telah melakukan penyusunan LAK tahun 2020 yang telah memuat informasi tentang kinerja secara lengkap dan menyeluruh.
- g. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Persidangan II kegiatan Diklat guna meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (seperti pelatihan penyusunan anggaran, indikator kinerja, dan penyusunan LAK)
- h. Menugaskan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang perencanaan, penganggaran, dan keuangan untuk mengelola akuntabilitas dilingkungan Persidangan II.



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

No.	Before	After
1.	Indikator belum SMART pada eselon dua masih menggunakan penghitungan Output	Indikator Kinerja pada level Eselon II sudah berbasis Outcome, dan Cascading kinerja untuk level bawahnya sudah dilakukan /disusun secara SMART menggunakan kerangka logis dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat.
2.	Pembagian Kerja pada tiap individu yang belum menggunakan prinsip SMART	Pembagian kerja pada tiap individu telah berdasarkan pada Analisa Jabatan dan pengawasannya dilakukan dengan Pengisian Catatan Harian (Akuntabilitas Individu) (SMART)
3.	Arah Kebijakan yang belum tergambar dan terdokumentasi	Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, Cash Planning) telah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku
4.	Belum ada ketentuan penyusunan Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Sesuai dengan Persekjen No. 2 Tahun 2019 (25 Januari 2020, maksimal 1 bulan pada tahun berikutnya)
5.	SDM yang menangani pengelolaan akuntabilitas belum mendapatkan Pendidikan secara optimal	Pengikutsertaan Pengembangan Kompetensi di bidang keuangan pada pegawai di lingkungan Biro Persidangan yang mempunyai tugas pengelolaan akuntabilitas



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS



Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Biro Persidangan II.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Nurul Faiziah
Jabatan : Plt. Kepala Biro Persidangan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, 02 Januari 2021
Pihak Pertama,

Dra. Nurul Faiziah
NIP. 19650220 199103 2 002



INDIKATOR KINERJA UTAMA

BESERTA PENJELASAN KAMUS INDIKATOR

ESELON I DAN ESELON II

RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2020-2024



Area V : Penguatan Pengawasan

Pengendalian Gratifikasi

Melaksanakan pembaharuan dokumen sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan bukti dukung berupa surat pernyataan dari Inspektorat bahwa tidak ada gratifikasi di unit kerja di lingkungan Biro Persidangan II

Penerapan SPIP

Melakukan pembaharuan Risk Register dan telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran di Biro Persidangan II

Pengaduan Masyarakat

- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- Telah dilakukan monev atas penanganan pengaduan masyarakat
- Hasil monev pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

WBS

- WBS sudah diinternalisasi
- WBS telah diterapkan

Penanganan Benturan Kepentingan

Pada pelaksanaan ZI tahun 2021 telah melakukan pembaharuan identifikasi benturan kepentingan keluarga



Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : ww.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Fauzsy Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 19681125 199302 2 001
Jabatan : Inspektur II
Unit Kerja : Inspektorat II

Dengan ini menyatakan bahwa Tidak Ada Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Biro Persidangan II.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Juni 2021
Inspektur II,

Dr. Hj. Fauzsy Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19681125 199302 2 001



KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDE
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REP

NOMOR : 118 / SEKJEN

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRAT
INSPEKTORAT UTAMA DAN UNIT PENGENDALIA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN R

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bersih dan bebas dari korupsi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu upaya pengendalian Gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dibentuk unit pengendalian Gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c. bahwa pembentukan unit dimaksud dalam huruf a, di Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

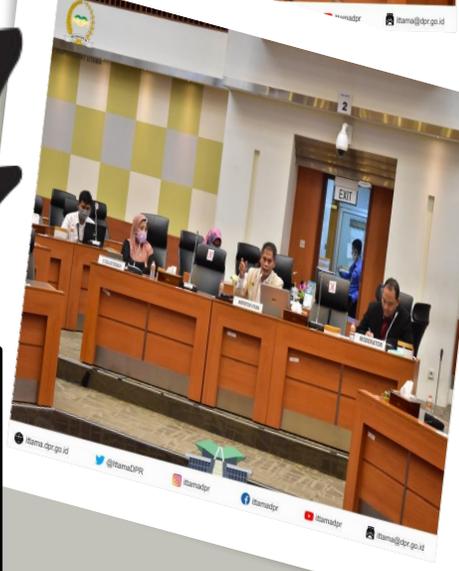
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 196703 1 001

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BADAN KEHLIAN				
No.	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Incebus Samsu, S.H., M.Hum.	19690701090001007 IV	Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang	Ketua
2.	Libe Salomo Silitonga, S.P.	196504281996031001 III	Kepala Bagian TU Badan Kehlilian	Sekretaris
3.	Susi Deryati, S.H., M.H.	197912242005022001 III	Kasubag TU Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Anggota
4.	Fahri Aeyar, S.Sos.	196805151990031007 III	Kasubag TU Pusat Perencanaan Undang-Undang	Anggota
5.	Poedj Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004 III	Analisis Kebijakan Mada	Anggota
6.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001 III	Analisis Hukum	Anggota
7.	Rizki Emi Birman, S.H.	19880929201901001 III	Analisis Hukum	Anggota

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN				
No.	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Supriherti, S.P., M.Si.	197101061998022001 IV	Kepala Bagian Sekretaris Komial I	Ketua
2.	Endah Siti Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001 IV	Kepala Bagian Sekretaris Panitia Khusus	Sekretaris
3.	Dr. Muhammad Djazuli, M.H.	196510031994031002 IV	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial	Anggota
4.	Muhammad Yus Iqbal, S.E.	196707171993031006 IV	Kepala Bagian Riset	Anggota
5.	Chairi Patris, S.P.	197111051998031002 IV	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional	Anggota



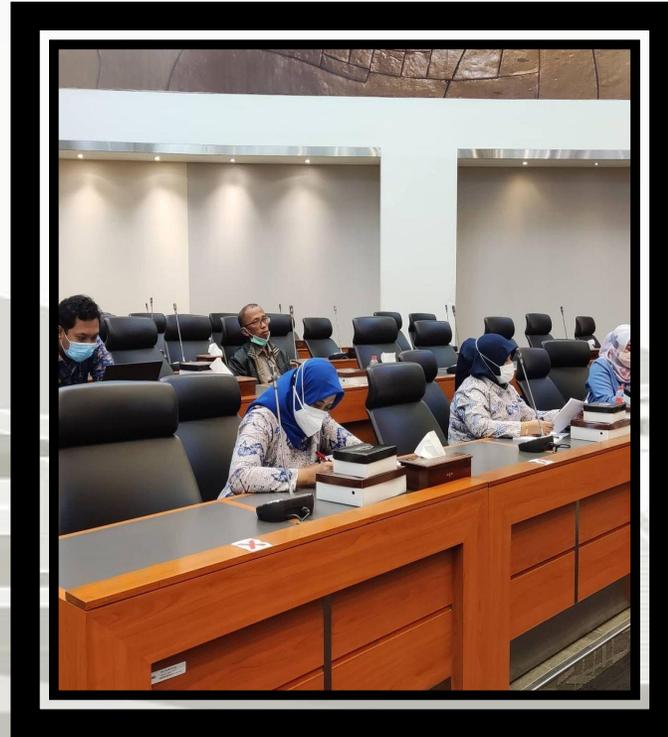
Surat Pernyataan dari Inspektorat Setjen DPR RI bahwa tidak ada laporan gratifikasi di lingkungan Biro Persidangan II

Telah Dibentuk UPG melalui penempatan salah satu pejabat di lingkungan Biro Persidangan II sebagai Anggota Tim UPG Setjen DPR RI

Telah dilaksanakan Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan di lingkungan Biro Persidangan II



Kegiatan Penerapan SPIP



Telah dilakukan pembaruan risk register (penilaian resiko) atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di Lingkungan Biro Persidangan II

Telah Dibentuk Satgas Manajemen Risiko melalui penempatan 3 pegawai di lingkungan Biro Persidangan II sebagai Anggota Tim Satgas Manajemen Risiko Setjen DPR RI

No.	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN
1.	Dra. Hani Yuliesih, M.Si.	196407261991032002/IV	Kepala Bagian Sekretariat Komisi II
2.	Dra. Nanik Herry Murti	196505061994032002/IV	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII
3.	Irfan S.Sos, MMSI.	196509101987021006/IV	Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen
4.	Drs. Mohamad Djazuli, M.Si.	196510311994031002/IV	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
5.	Muhammad Yus Iqbal, S.E.	196707171993031006/IV	Kepala Bagian Risalah
6.	Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H.	196709251994032003/IV	Kepala Bagian Persidangan Paripurna
7.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006/IV	Kepala Bagian Sekretariat BAKN
8.	Djoko Hanggoro, S.T.	197012282000031003/IV	Kepala Bagian Penerbitan
9.	Dewi Resmini, S.E., M.Si.	197104071992032001/IV	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI
10.	Mc. Zaqki Zachariuz Thamrin, S.S., M.Si.	197106242000031003/IV	Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan
11.	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.	197202292002121001/IV	Kepala Bagian Protokol
12.	Andri Suryanta, S.IP.	197312302000031003/III	Kepala Bagian Sekretariat Ketua
13.	Nelly Andalla, S.E.	197405121998032002/III	Kepala Subbagian TU MKD
14.	Danis Maya, S.H.	197410261999031004/IV	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
15.	Helen, S.Sos., M.AP	197904251998032001/III	Kepala Subbagian TU Alih Bahasa
16.	Susantomo, S.IP., M.AP	197909232005021001/IV	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
17.	Nina Herlina, S.H.	197910152005022001/III	Kepala Subbagian Rapat BURT
18.	Dian Anvari, S.E., M.S.M.	198209082005022001/IV	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
19.	Miranti Widiani, S.Sos., M.Si.	198210272009122003/III	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional
20.	Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.	197505172000032003/IV	Pustakawan Madya
21.	Novyanti	197411011999032003/III	Arsiparis Penyelia
22.	Indah Kurniasari, S.Sos., M.Kesos.	198308212009122002/II	Pranata Humas Muda



KEPUTUSAN KRETARIS JENDERAL DAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

OR : 1022 /SEKJEN/2021

TENTANG

TATAN TUGAS MANAJEMEN RISIKO JENDERAL DAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

IN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

dengan berfungsinya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20-2024, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko pengelolaan kinerja instansi;

untuk menerapkan manajemen risiko sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas dan Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Perintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Risiko Internal (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 4890);

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* (Birokrasi 2010-2025);

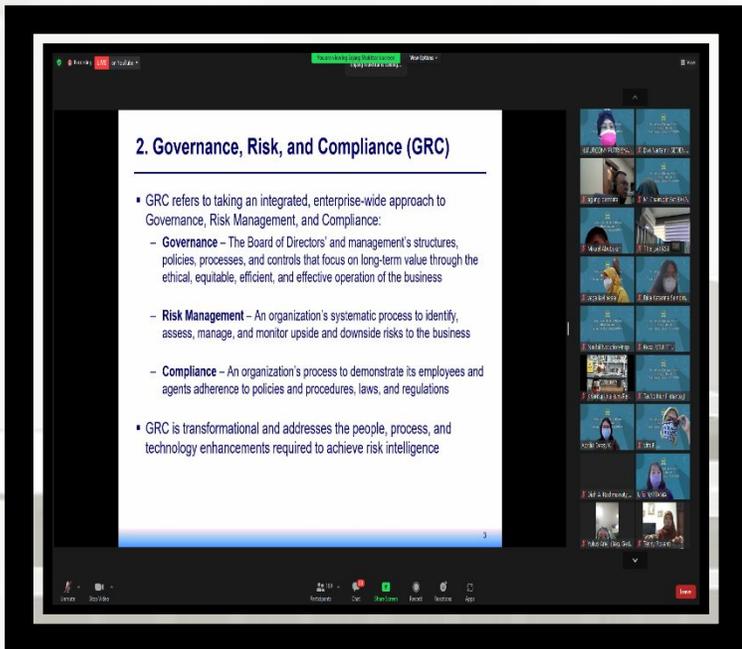
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

Menyebutkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



Kegiatan Penerapan SPIP



Sosialisasi Budaya Risiko



Workshop Penerapan Manajemen Risiko, Impelementasi Three Lines Model Risiko

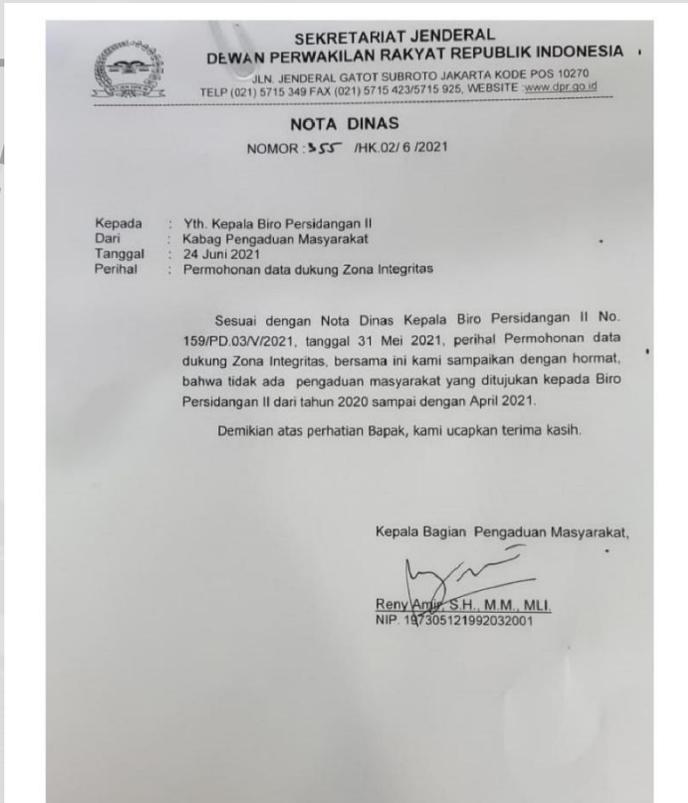
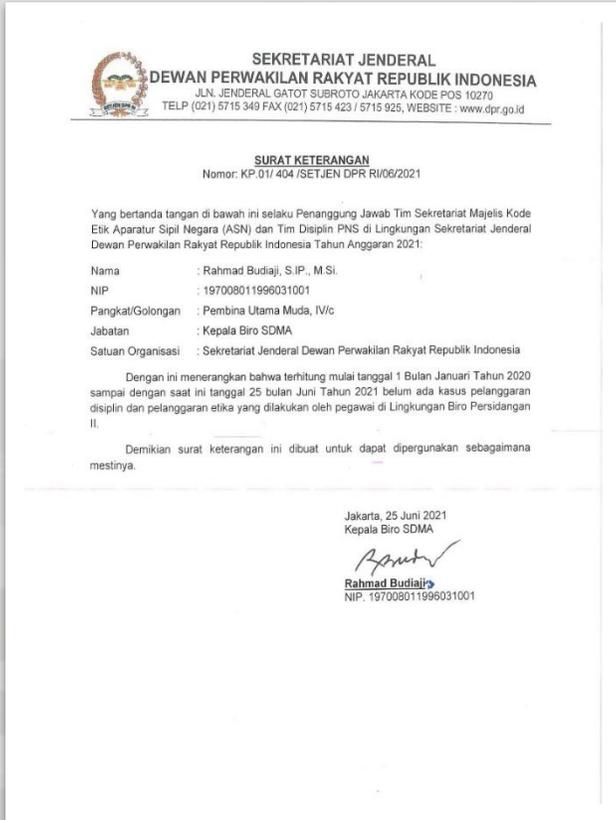


Knowledge Sharing Penguatan SPIP Terintegrasi



Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan Masyarakat

Surat Keterangan dari Biro SDM dan Aparatur bahwa tidak ada pelanggaran disiplin dan pelanggaran Etika yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Biro Bersidangan II



Pernyataan dari Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat bahwa tidak ada Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Biro Persidangan II



Pelaksanaan Kegiatan Whistle Blowing System

Surat Pernyataan dari
Inspektorat Setjen DPR RI
bahwa tidak ada pelaporan
pelanggaran melalui *WBS*
(*whistle Blowing System*) di
lingkungan Biro Persidangan II



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 19681125 199302 2 001
Jabatan : Inspektur II
Unit Kerja : Inspektorat II

Dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pelaporan pelanggaran melalui *Whistle Blowing System* (WBS) Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Biro Persidangan II.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Juni 2021
Inspektur II,

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19681125 199302 2 001



Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan Keluarga

Telah dilaksanakan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Biro Persidangan II



Telah dilaksanakan pembaharuan pohon keluarga di lingkungan Biro Persidangan II untuk identifikasi adanya benturan kepentingan keluarga



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 19681125 199302 2 001
Jabatan : Inspektur II
Unit Kerja : Inspektorat II

Dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pelaporan adanya benturan kepentingan Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Biro Persidangan II.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Juni 2021
Inspektur II,

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19681125 199302 2 001

Surat Pernyataan dari Inspektorat Setjen DPR RI bahwa tidak ada pelaporan adanya benturan kepentingan di lingkungan Biro Persidangan II



Pelaksanaan Kegiatan Public Campaign

Public Campaign
terhadap peningkatan
kualitas pelayanan melalui
survei dan pelaksanaan
WBK dan WBBM
DI LINGKUNGAN BIRO PERSIDANGAN II





AREA VI : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan

- Peningkatan Kebijakan Standar Pelayanan dengan melakukan pembaharuan Maklumat Pelayanan dan Banner Gratifikasi
- Pembuatan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan Banner Standar Pelayanan
- Pelaksanaan rapat konsultasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana terkait review SOP pelayanan publik sehubungan dengan ditetapkannya struktur organisasi baru.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

- Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan terhadap anggota DPR RI tahun 2019 dan 2021
- Publikasi hasil survei kepada publik melalui media sosial Biro Persidangan II
- Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil survei kepuasan layanan

Budaya Pelayanan Prima

- Mengikutsertakan pegawai-pegawai di lingkungan Biro Persidangan II untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan guna menerapkan/meningkatkan budaya pelayanan prima.
- Melakukan inovasi layanan secara digital (Sileg dan SiCavid), serta pengembangan lebih lanjut arsip digital Biro Persidangan II.
- Biro Persidangan II juga turut serta dalam melaksanakan program Kampus Merdeka, yaitu program pemberian magang kepada mahasiswa/mahasiswi untuk memberikan pengetahuan seputar kegiatan-kegiatan kedewanan di lingkup bidang badan-badan, mahkamah, dan panitia khusus.



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PELAYANAN PUBLIK



Biro Persidangan II telah memperbarui Maklumat Pelayanan

SEBELUM

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BIRO PERSIDANGAN II SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPR RI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

SETELAH

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BIRO PERSIDANGAN II SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPR RI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PELAYANAN PUBLIK

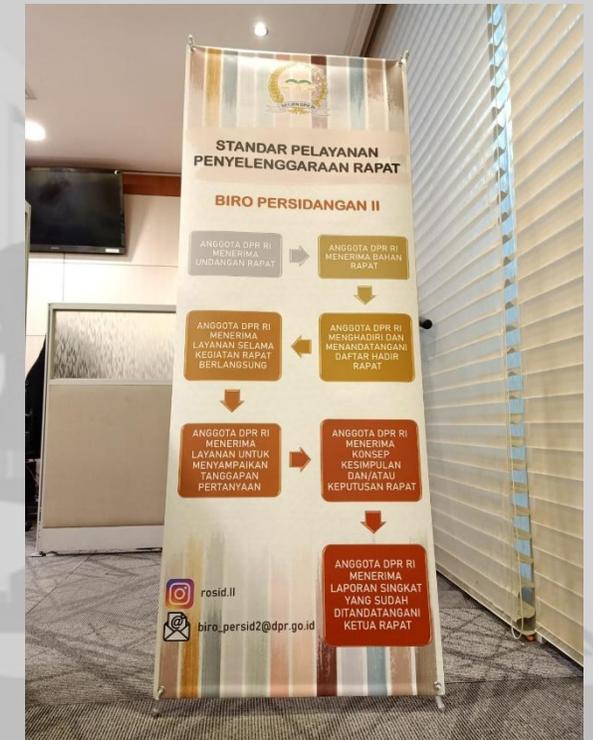
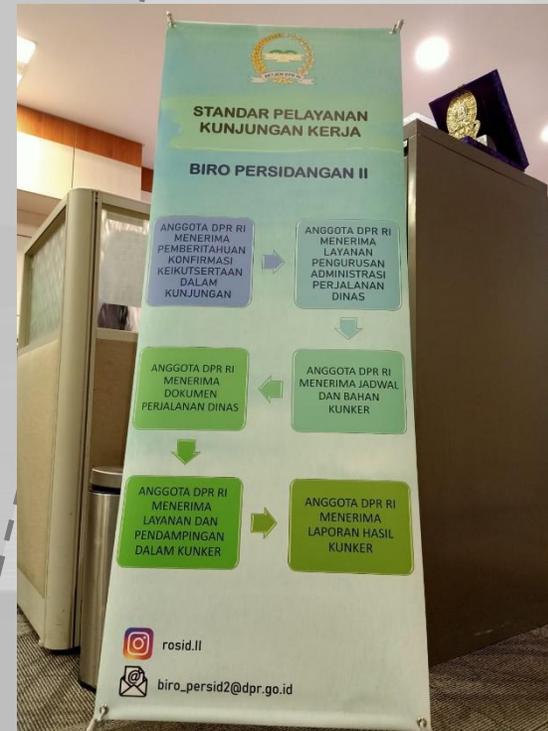


Selain memperbarui Maklumat Biro Persidangan II juga telah memperbarui Banner Standar Pelayanan Penyelenggaraan Rapat, dan telah diupload di media sosial Biro Persidangan II

SEBELUM



SETELAH





PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PELAYANAN PUBLIK



Telah mengirim/mengikutsertakan pegawai-pegawai di lingkungan Biro Persidangan untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) guna menerapkan/ meningkatkan budaya pelayanan prima, secara bertahap dari 49 Pegawai di lingkungan Biro Persidangan II, telah diikutsertakan Diklat Manajemen Persidangan tahun 2019 sebanyak 8 pegawai, tahun 2020 sebanyak 8 pegawai, dan pada tahun 2021 sebanyak 5 pegawai atau total sebanyak 21 pegawai yang telah mengikuti Diklat peningkatan pelayanan prima dibidang persidangan.



Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SERTIFIKAT

Nomor : PL/6.2/SETJEN DPR RI/PL.02/07/2021

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak
NIP : 198912092014021002
Pangkat/Gol Ruang : III/b, Penata Muda Tingkat I
Jabatan : Kasubbag Rapat Sekretariat Badan Anggaran
Bagian Set. Badan Anggaran

Telah Mengikuti

Pelatihan Manajemen Persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2021 dengan metode *Distance Learning* (Pembelajaran Jarak Jauh) yang setara dengan 36 Jam Pelajaran.

Jakarta, 30 Juli 2021
Kapus Pendidikan dan Pelatihan,


Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA


Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA
NIP. 196209261988032001



Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SERTIFIKAT

Nomor : PL/6.28/SETJEN DPR RI/PL.02/07/2021

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Nindah Warachmah Suharji, S.E.
NIP : 199509162019032001
Pangkat/Gol Ruang : III/a, Penata Muda
Jabatan : Analis Data Dan Informasi
Bagian Set. Badan Anggaran

Telah Mengikuti

Pelatihan Manajemen Persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2021 dengan metode *Distance Learning* (Pembelajaran Jarak Jauh) yang setara dengan 36 Jam Pelajaran.

Jakarta, 30 Juli 2021
Kapus Pendidikan dan Pelatihan,

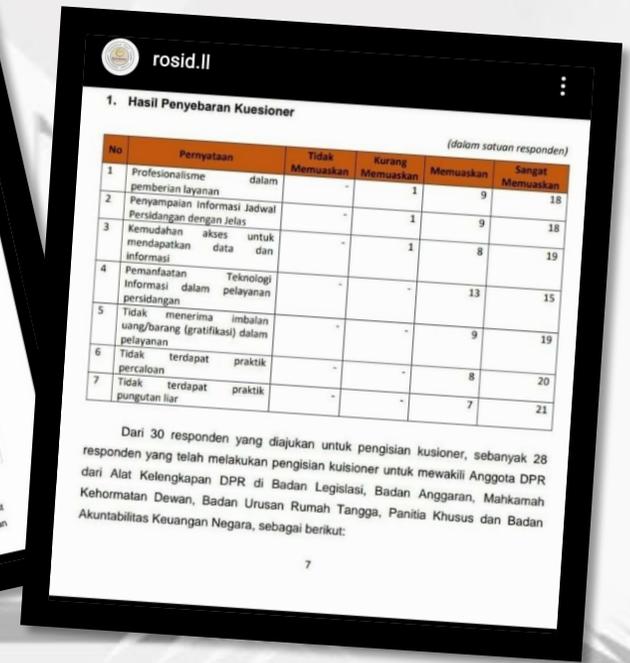
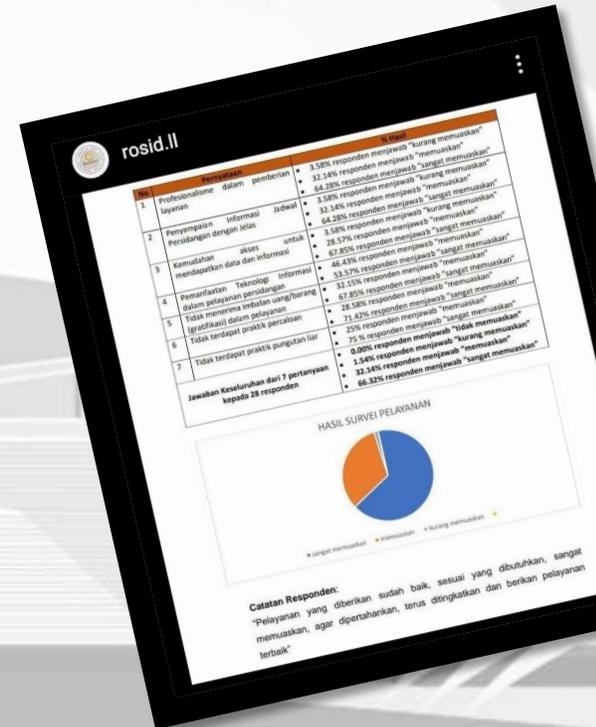
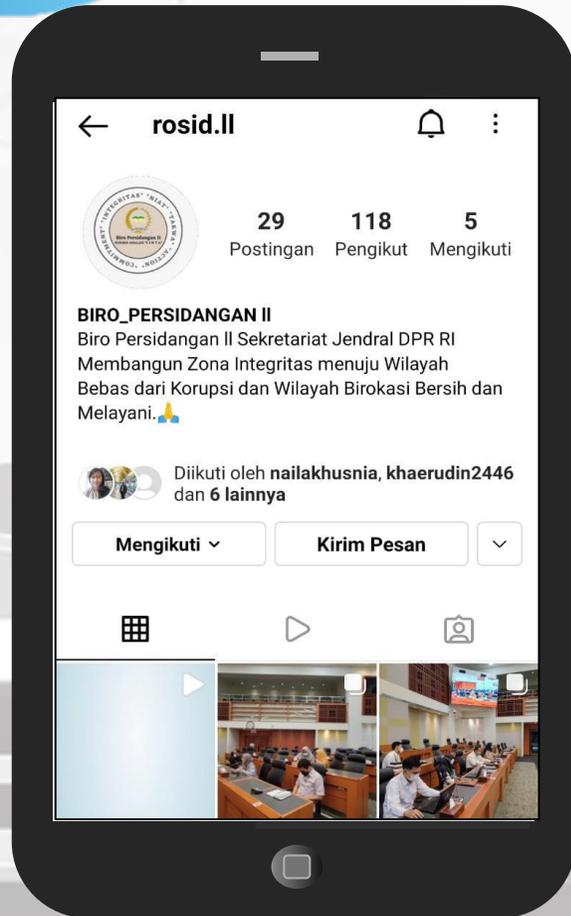

Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA


Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA
NIP. 196209261988032001



PELAKSANAAN KEGIATAN DI AREA PELAYANAN PUBLIK

Hasil survei kuesioner terkait Pelayanan Publik yang diunggah pada media sosial Biro Persidangan II



Penyediaan informasi kegiatan pelayanan melalui media sosial Biro Persidangan II dan dapat diakses melalui link

https://instagram.com/rosid.11?utm_medium=copy_link

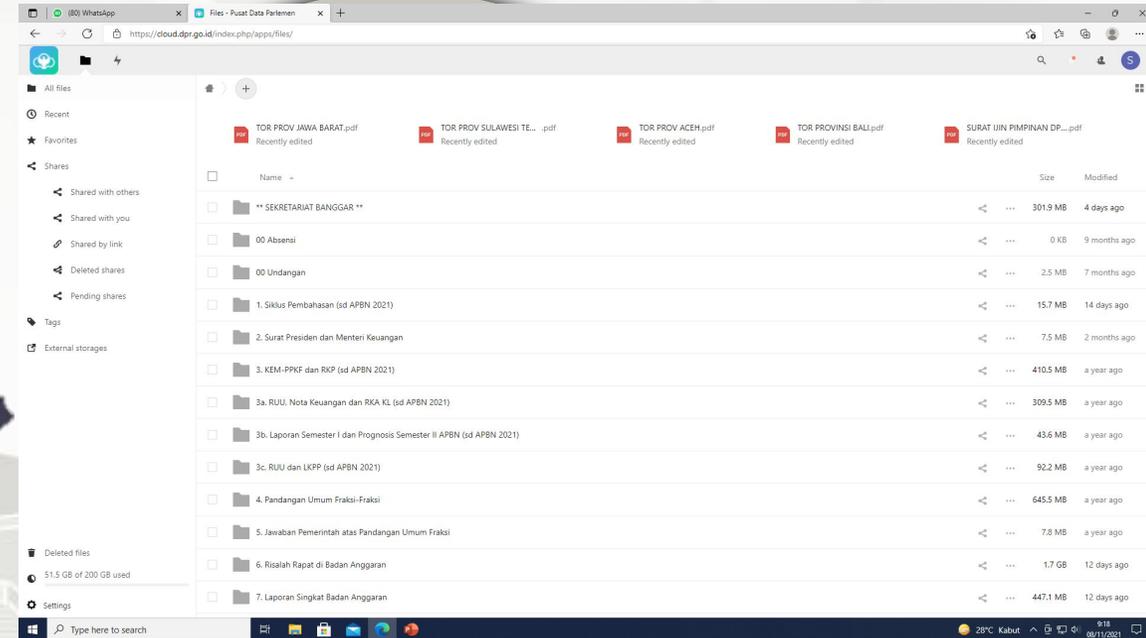


INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK



Sebelum

Data tersimpan dalam PC, sehingga berisiko tinggi hilang akibat kerusakan pada PC.



Setelah

Penyimpanan data dilakukan di cloud.dpr.go.id, sehingga data yang disimpan dapat lebih aman dan meminimalisir risiko data hilang, dan untuk kedepannya Biro Persidangan II telah merencanakan pengembangan sistem arsip digital dengan server internal DPR RI



INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK



Sebelum

Penyampaian dokumen (bahan) dalam bentuk *hardfile* yang tidak ramah lingkungan dan pemborosan.



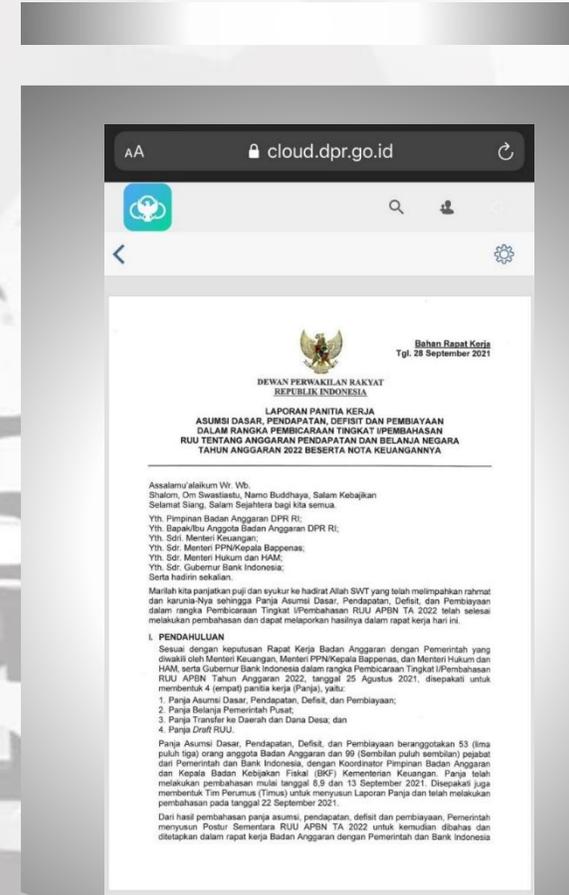
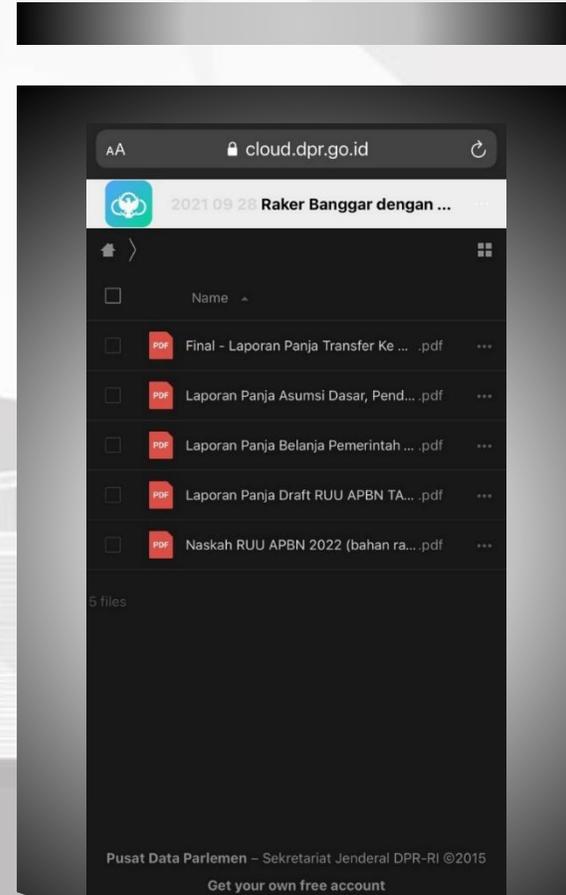
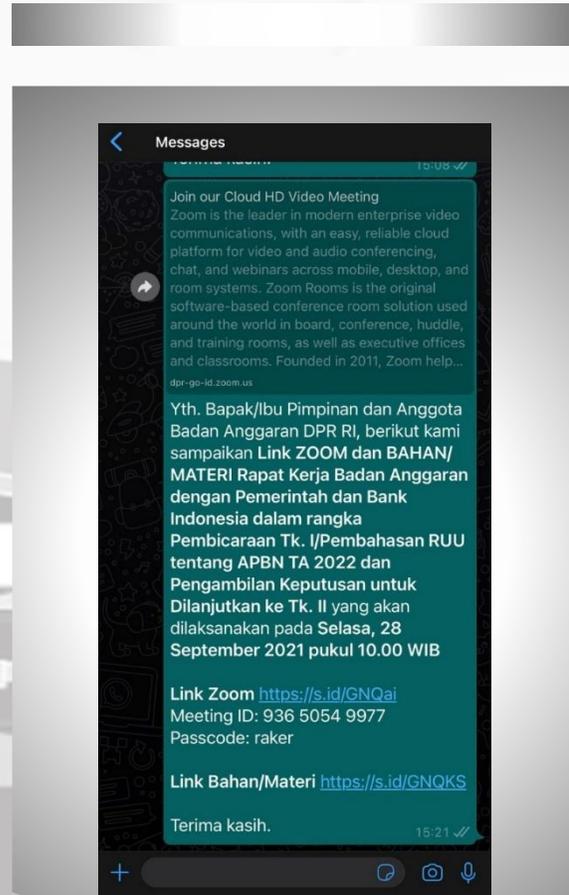
Sesudah

Penyampaian dokumen (bahan) dalam bentuk *softfile* yang paperless dan lebih ramah lingkungan dan lebih efisien.



INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Penyampaian bahan-bahan rapat kepada Anggota DPR RI telah disampaikan secara digital melalui cloud DPR, hal ini dilakukan untuk menerapkan kebijakan *paperless* dan mendukung visi DPR untuk menjadi Parlemen Modern





INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK



Selain penggunaan cloud pada Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan seperti:

No.	Sebelum	Setelah
1	Belum ada Standar Pelayanan	Standar Pelayanan Penyelenggaraan Rapat, Standar Pelayan Kunjungan Kerja
2	Belum ada jargon pelayanan	Terdapat Jargon pelayanan Cepat, Aman Valid dan Update pada Bagian Set. BAKN
3	Inovasi pelayanan belum optimal	Melakukan inovasi dengan pengembangan terhadap pelayanan dukungan bahan/materi rapat sekretariat BAKN DPR RI secara online melalui Sistem Informasi SI-CAVID



INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Sistem Informasi AKD Administrasi Administrasi (2) Log Out Portal

Nama: Muhammad Chairudin
Peran: user

Dashboard Sistem Informasi Cepat, Aman, Valid dan Update (SI-CAVID)
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - Biro Persidangan II - Deputi Persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Jadwal Kegiatan 4 dokumen [VIEW]	Undangan Rapat 1 dokumen [VIEW]	Term Of Reference 2 dokumen [VIEW]	Skenario Rapat 10 dokumen [VIEW]
Jawaban Tertulis 1 dokumen [VIEW]	Laporan Singkat 10 dokumen [VIEW]	Risalah Rapat 7 dokumen [VIEW]	Rekaman Rapat (Zoom) 0 dokumen [VIEW]
Laporan Kunjungan Kerja (Dalam Negeri) 5 dokumen [VIEW]	Laporan Kunjungan Kerja (Luar Negeri) 0 dokumen [VIEW]	Hasil Telaah (Tematik) 0 dokumen [VIEW]	Hasil Telaah (Penunjukan) 2 dokumen [VIEW]
Laporan Paripurna Hasil Telaah 0 dokumen [VIEW]	Buku Kinerja Tahunan 1 dokumen [VIEW]	Ringkasan IHPS BPK 22 dokumen [VIEW]	

Sistem Informasi AKD Administrasi Administrasi (2) Log Out Portal

Nama: Muhammad Chairudin
Peran: user

Dashboard Sistem Informasi Cepat, Aman, Valid dan Update (SI-CAVID)
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - Biro Persidangan II - Deputi Persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI

SI-CAVID (1)
• Jadwal Kegiatan (4 dokumen)
• Undangan Rapat (1 dokumen)
• Term Of Reference (2 dokumen)
• Skenario Rapat (10 dokumen)
• Jawaban Tertulis (1 dokumen)
• Laporan Kunjungan Kerja (Dalam Negeri) (5 dokumen)

SI-CAVID (2)
• Jadwal Kegiatan (4 dokumen)
• Undangan Rapat (1 dokumen)
• Term Of Reference (2 dokumen)
• Skenario Rapat (10 dokumen)
• Jawaban Tertulis (1 dokumen)
• Laporan Kunjungan Kerja (Dalam Negeri) (5 dokumen)

SI-CAVID (3)
• Jadwal Kegiatan (4 dokumen)
• Undangan Rapat (1 dokumen)
• Term Of Reference (2 dokumen)
• Skenario Rapat (10 dokumen)
• Jawaban Tertulis (1 dokumen)
• Laporan Kunjungan Kerja (Dalam Negeri) (5 dokumen)

Buku Kinerja Tahunan
1 dokumen [VIEW]

Ringkasan IHPS BPK
22 dokumen [VIEW]

Data Dokumen Terkini

Judul	Jenis	Tanggal
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI II PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI IV PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI III PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI I PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI II PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS METRA KERJA KOMISI V PADA PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2018	15. Ringkasan IHPS BPK	19-10-2021

Screenshot aplikasi sicavid, aplikasi yang digunakan oleh unit Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk menyimpan dan menyediakan dokumen-dokumen kebutuhan rapat kepada Anggota



INOVASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK



Biro Persidangan II juga telah melakukan pengembangan lebih lanjut pada Aplikasi Sistem Legislasi (SiLeg), dengan menambahkan fitur **interaksi** kepada penggunaan layanan SiLeg

No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update
1		RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	30 Jul 2021
2		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	30 Jul 2021
3		RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	30 Jul 2021
4		RUU tentang Keamanan Laut	DPR	30 Jul 2021
5		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	30 Jul 2021
6		RUU tentang Tugas Perbantuan Mister	DPR	30 Jul 2021

SEBELUM

SETELAH

No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update
1		RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	21 Okt 2021
2		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	21 Okt 2021
3		RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	21 Okt 2021
4		RUU tentang Keamanan Laut	DPR	21 Okt 2021
5		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	21 Okt 2021
6		RUU tentang Tugas Perbantuan Mister	DPR	21 Okt 2021
7		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	21 Okt 2021
8		RUU tentang Paradiplomasi	DPR	21 Okt 2021
9		RUU tentang Pertanian	DPR	21 Okt 2021



Rekomendasi Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Harus dapat memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan agar setiap individu agen perubahan dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi, issue strategis dan reformasi	Agen perubahan dari unit Biro Persidangan II telah membuat rencana perubahan dan mengembangkan inovasi perubahannya sesuai dengan pengawasan dan arahan oleh pimpinan unit.
2.	Harus dapat memaksimalkan dialog kinerja antara atasan dengan bawahan guna memastikan tercapainya target kinerja, sekaligus sebagai upaya mengatasi target kinerja yang tidak tercapai	Pimpinan di lingkungan unit Biro Persidangan II telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dan telah melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap individu melalui aplikasi PPKP.
3.	Melaksanakan penguatan integritas aparatur dengan melakukan pemetaan/identifikasi dan memitigasi yang diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin akan terjadi	Unit Biro Persidangan II telah melakukan pemetaan dan identifikasi terkait benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, dan manajemen resiko secara berkala serta menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat.



HASIL SURVEI INTERNAL



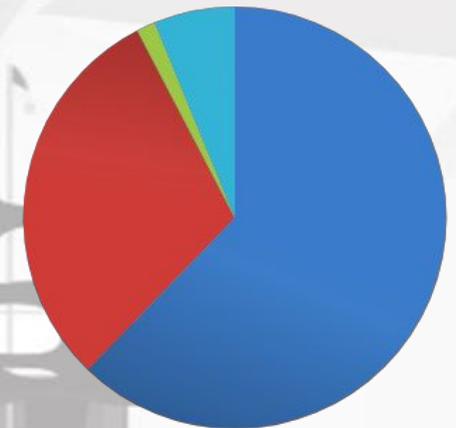
Biro Persidangan II Telah melaksanakan Survei internal terkait kepuasan pelanggan atas pelayanan yang dilakukan oleh Biro Persidangan II

Terdapat 30 Responden yang dilakukan survei dengan hasil :

- Sebanyak 66.32% Responden menyatakan **Sangat Puas** dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 32.14% Responden menyatakan **Puas** dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 1.54% Responden menyatakan **Kurang Puas** dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II
- Sebanyak 0.00% Responden menyatakan **Tidak Puas** dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Persidangan II

Responden yang telah berpartisipasi mengisi questioner sampai saat ini sebanyak 28 Responden

Hasil Survei Internal



■ Sangat Puas
■ Puas
■ Kurang Puas
■ Tidak Puas
■ Tidak mengisi



SURVEI ZI KEMENPAN RB



Biro Persidangan II Telah Mengikuti Survei External Yang Dilaksanakan Untuk Memenuhi Penilaian Dalam Komponen Hasil Dari Evaluasi RB Dan Evaluasi ZI Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian PANRB

Terdiri dari 105 Responden dengan rincian :

- Bagian Sekretariat Badan Legislasi 25 Responden
- Bagian Sekretariat Badan Anggaran 33 Responden
- Bagian Sekretariat BURT 13 Responden
- Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan 13 Responden
- Bagian Sekretariat BAKN 10 Responden
- Bagian Sekretariat Pansus 11 Responden

Responden yang telah berpartisipasi mengisi questioner sampai saat ini sebanyak 64 responden



SURVEI ZI KEMENPAN RB

Eviden keseluruhan dapat di akses
pada :

<https://drive.google.com/drive/folders/1tsI-QzbQW2zP8yAtRSrlx8L1h8fTOHgn>



TERIMA KASIH

Sukses adalah Cinta

COMMITMENT • INTEGRITAS • NIAT • TAQWA • ACTION



rosid.ll



Biro_persidangan2@dpr.go.id